

LAPORAN HASIL TINDAK
LANJUT PENGAWASAN
HAWASBID
PENGADILAN AGAMA
SIJUNJUNG
TRIWULAN III 2022



PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Jl. Prof. M. Yamin, S.H. No. 65 Muaro Sijunjung – Sumatera Barat



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN BIDANG
OLEH HAWASBID PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TRIWULAN III TAHUN 2022
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI, ADMINISTRASI UMUM, MANAJEMEN PERADILAN DAN PELAYANAN PUBLIK**

No.	Temuan/Kondisi	Kriteria	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
				Sudah Ditindak lanjut	Sedang Proses	Belum Ditindak lanjut	Penjelasan
A.	TEKNOLOGI INFORMASI / SIPP						
1.	Dokumen BAS belum diunggah di SIPP sebanyak 7 perkara (267G, 269G, 273G, 286G, 285G, 205P dan 209P)	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 Tgl. 11-02-2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik pada Peradilan Agama	Segera melengkapi dokumen tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti, dengan mengupload dokumen BAS
B.	PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDSOS						
1	Satpam yang ada di website belum diperbarui	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	Segera perbaiki	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki data PPNPN (satpam) di website
2.	Inovasi PA Sijunjung belum dimasukkan dalam layanan di SIPP Menpan RB	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	Segera perbaiki	√			Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate SIPP Menpan

3.	Berita PA Sijunjung di SIPP Menpan-RB tidak diupdate. Terakhir diupload tanggal 9 September 2022	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan mengupdate berita di SIPPmenpan
4.	LHKPN yang diupload di website baru berupa bukti kirim/tanda terima. Seharusnya yang dipublikasikan adalah pengumumannya	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperbarui pengumuman LHKPN
5.	Terdapat pegawai yang sudah mutasi namun data LHKPNnya belum diperbarui	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperbarui data LHKPN
6.	Belum terdapat video prosedur pengajuan perkara bagi tuna rungu dengan bahasa isyarat	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan dan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama,	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menyediakan link video prosedur pengajuan perkara bagi tuna rungu

		maka pengadilan wajib memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas					
	ADMINISTRASI UMUM						
C	KEPEGAWAIAN						
1	Mapping keterampilan pegawai belum mempertimbangkan keadaan kantor. Seharusnya dipetakan ketrampilan apa saja yang dibutuhkan, kemudian dilihat apakah ketrampilan tersebut sudah dimiliki oleh para pegawai. Jika belum, maka perlu dianalisis cara mengatasinya, apakah dengan pengajuan diklat atau cara lain. Jika memungkinkan, dipetakan juga ketrampilan apa yang sudah dimiliki para pegawai sehingga ketrampilan tersebut dapat dikembangkan kompetensinya baik oleh yang bersangkutan maupun dikembangkan kepada pegawai lain	Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Segera tindaklanjuti temuan tersebut	√			Sudah ditindaklanjuti dengan membentuk melakukan pemetaan pegawai
D	MANAJEMEN PERADILAN & PELAYANAN PUBLIK						
1.	Terdapat SK yang tidak menjelaskan uraian tugas, kewajiban atau tanggung jawab sesuai isi SK. Misalnya pada SK-SK berikut: a. SK Nomor W3-A10/1305.a/HM.02.3/SK/8/20 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Inovasi; b. SK Nomor W3-A10/1304.a/	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpres Nomor 87	Dilakukan perbaikan SK dengan pencantuman uraian tugas pada setiap penunjukan tim	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperbaiki SK

	HK.05/SK/8/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Perkara;	Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan					
2	Terdapat pertanyaan di google yang belum dijawab dan ulasan yang belum diberikan apresiasi	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 1812/DJA/HM.00/6/2021, tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan	Dibuatkan SK tentang pengelola berbagai akun media sosial agar pemberian layanan kepada masyarakat lebih maksimal	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menjawab ulasan di google.
3	Satpam sering tidak berada di pos satpam selama jam kerja	Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3969/DJA/HM.00/09/2022, tanggal 26 September 2022, perihal " Temuan Hasil Inspeksi Mendadak "	Satpam yang bertugas jaga memberhentikan pihak berperkara yang masuk dengan memberikan kode untuk perlahan-lahan saat ada pihak yang akan memasuki PA Sijunjung. Setelah para pihak berhenti, ditanyakan keperluannya dan diberikan kalung sesuai dengan kepentingannya. Jika memungkinkan, akan lebih baik jika dibuat portal di pintu masuk, dan pintu keluar ditutup untuk memudahkan para pihak menerima/ menyerahkan kalung	√			Sudah ditindaklanjuti dengan briefing satpam dan menerapkan pemasangan kalung identitas di pos satpam.
4	Tidak ada survei kepuasan petugas Posbakum	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 1812/DJA/HM.00/6/2021,	Dibuatkan menu survei kepuasan petugas posbakum pada aplikasi yang	√			Sudah ditindaklanjuti dengan menyediakan data petugas posbakum pada

		tanggal 09 Juni 2021, tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan	sudah ada				menu survei kepuasan layanan PTSP
5	Terjadi pergantian petugas PTSP karena adanya latsar CPNS, namun tidak ada SK yang menunjukkan pergantian petugas PTSP (sementara/permanen)	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor: 1812/DJA/HM.00/6/2021, tanggal 09 Juni 2021, tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan	Segera dibuatkan SK jika ada pergantian petugas PTSP dan disampaikan kepada Tim IT agar survei petugas layanan PTSP disesuaikan dengan yang bertugas karena nanti akan berkaitan dengan <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	√			Sudah ditindaklanjuti dengan memperhatikan temuan ini untuk ke depannya yaitu membuat SK baru apabila terjadi pergantian petugas tersebut. Pergantian petugas PTSP sebelumnya bersifat tentatif dan dilaksanakan berdasarkan hasil rapat pimpinan.
6.	Terdapat pegawai yang menggunakan sandal saat apel dan rapat	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Buku IV tentang tatalaksana Pengawasan Peradilan	Ketua Pengadilan Agama melakukan pembinaan saat apel agar seluruh hakim, pegawai dan PPNPN menggunakan sepatu saat apel, rapat dan kegiatan kantor lain	√			Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pembinaan pada saat apel dan rapat serta pembinaan khusus oleh atasan ybs.

Muaro Sijunjung, 5 Oktober 2022



Ketua,

AZIZAH ALI

EVIDEN/BUKTI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN HAWASBID PA SIJUNJUNG BIDANG TI, WEB&MEDSOS DAN AMINISTRASI UMUM TRIWULAN III TAHUN 2022

A.1 Dokumen BASS di SIPP sudah dilengkapi seluruhnya

192.168.88.201/pendukung2018/kontrol_detil.php?pg=c2&thn=2022&bln=9 90% [Maximise](#)

DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS

DETIL DATA SIDANG TIDAK DILENGKAPI DOKUMEN BAS PERIODE 2022

No	Nomor Perkara	Tanggal Daftar	Tanggal PMH	Tanggal Penetapan PP	Tanggal Penetapan JSP	Tanggal PHS	Tanggal Sidang	Hakim Ketua	Nama PP	Nama JSP
----	---------------	----------------	-------------	----------------------	-----------------------	-------------	----------------	-------------	---------	----------

B.1 Update data Satpam di website

pa-sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=126&Itemid=497&selectedItem=126

Home > Kewasnetarlatan > Informasi Kewasnetarlatan > Tindakan Pengawasan > Hasil Tindakan Pengawasan > Profil PPNPN

Profil PPNPN Pengadilan Agama Sijunjung

01. GUSHARIYANTO

Nama Lengkap	Gushariyanto
Tempat / Tgl. Lahir	Savahurto / 10 Agustus 1986
Pendidikan Terakhir	SLTA
Jabatan	PPNPN

02. SYAFRIZAL ARIF

Nama Lengkap	Syafrizal Arif
Tempat / Tgl. Lahir	Musiro / 30 Desember 1981
Pendidikan Terakhir	SLTA
Jabatan	PPNPN

03. ROVANY FERNANDO SAPUTRA

Nama Lengkap	Rovany Fernando Saputra
Tempat / Tgl. Lahir	Sook / 29 Juli 1996
Pendidikan Terakhir	SLTA
Jabatan	PPNPN

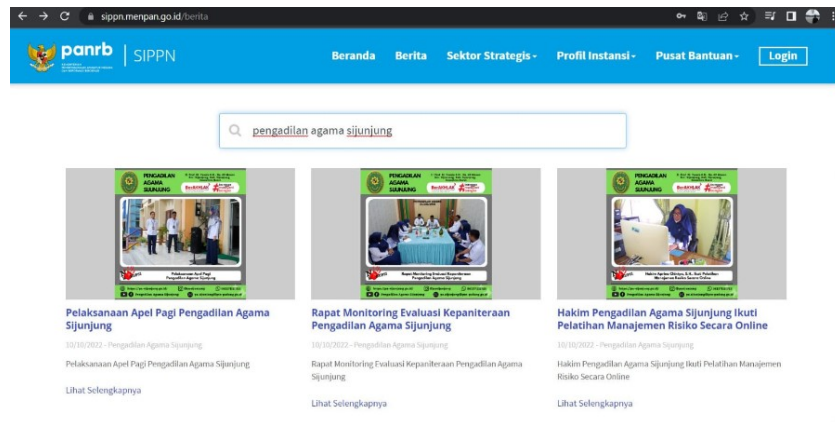




ACo
Access CCTV Dome

Informasi Cepat

B.3 Inovasi dan Berita PA Sijunjung di SIPP Menpan-RB sudah diupdate



B.4 LHKPN yang diupload di website baru berupa bukti kirim/tanda terima (2 orang), sudah dipublikasikan pengumumannya

Written by Super User on 10 April 2017. Hits: 766

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2021
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG**

No	Nama	Jabatan	Tahun Pelaporan 2021	Tanggal Pelaporan
1.	Azizah Ali, S.H.I., M.H	Ketua	download	12 Januari 2022
2.	Nurhadi, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	download	3 Januari 2022
3.	Zulkarnaen Ritonga, S.H.I	Hakim	download	3 Januari 2022
4.	Robbil Alfres, S.Sy	Hakim	download	3 Januari 2022
5.	Aprina Chintya, S.H	Hakim	download	4 Januari 2022
6.	Drs. Nurfadhil	Panitera	download	3 Januari 2022
7.	Syahminar, S.H.I, M.H	Panmud Hukum	download	10 Januari 2022
8.	Muhamad Imran, S.H	Panmud Gugatan	download	10 Januari 2022
9.	Rosniwati, S.H	Panmud Permohonan	download	5 Januari 2022
10.	Muzakir, S.H.I	KPA	download	2 Januari 2022

Download links for the LHKPN reports are provided for each official listed in the table.

KPK PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AZIZAH ALI
2. Jabatan : KETUA
3. NIK : 289193

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/30 m2 di KAB / KOTA PASAMAN BARAT: HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, DATSUN HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

KPK PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ROBBIL ALFRES
2. Jabatan : HAKIM
3. NIK : 738039

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOTOR, VARIO 125 (GR) ISS A16Q207M1 AJT / BPM SLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

D. SURAT BERHARGA

B.5 Pegawai yang sudah mutasi, data LHKPNnya sudah diperbarui

	Beranda Halaman Utama	Tentang Pengadilan Profil Satker	Informasi Informasi Umum	Kepaniteraan Informasi Kepaniteraan	Kesekretariaan Informasi Kesekretariaan
	Home > Kesekretariaan Informasi Kesekretariaan > Laporan Harta Kekayaan...				

Written by Super User on 10 April 2017. Hits: 771

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2021 PENGADILAN AGAMA SUJUNG

No	Nama	Jabatan	Tahun Pelaporan	Tanggal Pelaporan
			2021	
1.	Azizah Ali, S.H.I., M.H	Ketua	download	12 Januari 2022
2.	Nurhadi, S.H.I., M.H.	Wakil Ketua	download	3 Januari 2022
3.	Zulkarnaen Ritonga, S.H.I	Hakim	download	3 Januari 2022
4.	Robbil Alfires, S.Sy	Hakim	download	3 Januari 2022
5.	Aprina Chintya, S.H	Hakim	download	4 Januari 2022
6.	Drs. Nurfadhil	Panitera (sudah mutasi ke PA Solok Tgl. 29-07-2022)	download	3 Januari 2022
7.	Syahminar, S.H.I., M.H	Panmud Hukum	download	10 Januari 2022
8.	Muhamad Imran, S.H	Panmud Gugatan (sudah mutasi ke PA Talu Tgl. 29-07-2022)	download	10 Januari 2022
9.	Rosniwati, S.H	Panmud Permohonan	download	5 Januari 2022
10.	Muzakir, S.H.I.	KPA	download	2 Januari 2022
1.	Erathoni Agung S, S.H.	Panitera (masuk ke PA Sij Tgl. 26-07-2022)	download	1 Januari 2022

d/1kPwkhvSmmWg6pc2P3Xqq48ZgdSHcKm/view



2021



PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERATHONI AGUNG SARIPRAJA

2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA HUKUM

3. NIK : 426423

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

2. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA KERINCI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

B.6 Video prosedur pengajuan perkara bagi tuna rungu dengan bahasa isyarat

pa-sijunjung.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=517&Itemid=669

Beranda
Tentang Pengadilan
Informasi
Kerapinteraan
Kesejahteraan
Layanan Publik
Publikasi

Home > Layanan Publik > Informasi Publik > Prosedur Pelayanan U...

Written by Super User on 10 October 2022 Hits: 2

Prosedur Pelayanan Untuk Disabilitas

Pilih Bahasa
Dibersayakan oleh Google Terjemahan

WhatsApp
Telegram
Facebook
Instagram
YouTube
Twitter

Informasi Cepat
Link Satker Wilayah PTA se-Sumatera Barat
Contoh Surat Gugatan atau

KLIK DISINI



#badilag

Layanan dan Prosedur Berperkara di Peradilan Agama Untuk Disabilitas

C.1 Mapping keterampilan pegawai mempertimbangkan keadaan kantor

MAPPING KOMPETENSI SDM PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Kategori : Tenaga Teknis

NO	NAMA	SKILLS				
		Kompetensi Teknis	Kompetensi Manajerial	Kompetensi Sosio Kultural	Microsoft Office	SIPP
1	Erathoni Agung Saripraja					
2	Rosniwati					
3	Syahminar					
4	Idawati JS					
5	Nurul Fitri					
6	Annesia Haripraptika					
7	Amrina Rasyada W					
8	Syaifur Rahman Syahid					

Ket:



tidak butuh pelatihan



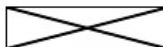
sedang pelatihan



sudah terlatih dan bisa melatih



butuh pelatihan



sudah dilatih

MAPPING KOMPETENSI SDM PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

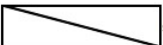
Kategori : Tenaga Non Teknis

NO	NAMA	SKILLS				
		Kompetensi Dasar	Kompetensi Manajerial	Kompetensi Bidang	Komptensi Khusus	Microsoft Office
1	Muzakir					
2	Nila Dwiva					
3	M. Rachim					
4	Selly Tria Amanda					

Ket:



tidak butuh pelatihan



sedang pelatihan



sudah terlatih dan bisa melatih



butuh pelatihan



sudah dilatih

**EVIDEN/BUKTI TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN HAWASBID
BIDANG MANAJEMEN PERADILAN & PELAYANAN PUBLIK
TRIWULAN III TAHUN 2022**

1. Perbaiki SK-SK dengan menjelaskan uraian tugas tanggung jawab tim

7.16.1 SK Tim Penanganan Benturan x +
s%202022/7.16.1%20SK%20Tim%20Penanganan%20Benturan%20Kepentingan.pdf

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

KESATU : Menunjuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :

1. Menerima laporan terjadinya benturan kepentingan yang berhubungan dengan jabatan dan pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Sijunjung
2. Melakukan konfirmasi dan menyelesaikan benturan kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini untuk disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sijunjung
Pada Tanggal : 1 Agustus 2022

hun%202022/Sk%20Pengelola%20keuangan%20perkara%20agsts%2020221.pdf

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penghentian Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perakara;

7. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2017.a/DJA/OT/01.3/11/2015 tentang Pedoman Pola Keuangan Perkara di Pengadilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sijunjung Nomor : W3-A10/55/HK.05/1/2022 tentang Penunjukan Tim Pengelola Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan Perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung Tahun 2022;

Ketiga : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung;

Keempat : Tim pengelola keuangan perkara pada Pengadilan Agama Sijunjung bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut :

1. Membantu merencanakan kegiatan administrasi keuangan perkara;
2. Mengelola seluruh administrasi keuangan perkara;
3. Melakukan koordinasi untuk kelancaran pengelola keuangan perkara;
4. Melaporkan hasil pengelolaan keuangan perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Sijunjung melalui atasan langsungnya setiap sebulan sekali;

hun%202022/SK%20Penetapan%20Tim%20Inovasi%20terbaru%20agsts%202022.pdf

4. Pengadilan Inklusif yaitu Pengadilan yang ramah terhadap kaum perempuan dan anak-anak dengan menyediakan ruang laktasi (menyusui) dan tempat bermain untuk anak-anak yang berumur di bawah lima tahun;

5. Pemisahan parkir untuk roda dua dan roda empat serta memberi pembatas parkir untuk satu motor;

Ketiga : Ketua pada Tim Pengelola Inovasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir pencarian ide-ide inovasi yang dibutuhkan;
- b. Mengkoordinir penyiapan inovasi;
- c. Mengkoordinir penyiapan administrasi;
- d. Menkoordinir penyiapan aplikasi yang dibutuhkan;
- e. Berkoordinasi dengan instansi terkait Pengelolaan inovasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi;

Sekretaris tim Pengelola inovasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan administrasi yang dibutuhkan;
- b. Menyiapkan data dukung Inovasi;
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan inovasi;
- d. Melakukan Penginputan data ke dalam aplikasi kompetisi inovasi dan /atau aplikasi yang terkait dengan data inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sijunjung

Tim Aplikasi dan pengembangan Tim pengelola inovasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memastikan inovasi telah berjalan sesuai dengan tujuan;
- b. Mencari ide baru inovasi;
- c. Menyiapkan aplikasi dan hal lainnya terkait dengan kelengkapan pelaksanaan inovasi;
- d. Menyiapkan video untuk data dukung penilaian inovasi;
- e. Mengembangkan inovasi;

Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung

2. Ulasan pada akun google Pengadilan Agama Sijunjung sudah dijawab

Pengadilan Agama Sijunjung

Jl. M Yamin No.85, Muaro, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat

4,6  65 ulasan 

 **Wahana Wahana**
1 ulasan · 1 foto

 seminggu lalu **BARU**

Menurut saya pengadilan agama sijunjung sangat baik, penyambutan kami disini sangat di sambut dengan sangat ramah oleh pegawai disini, bapak ibu hakim yang awalnya saya pikir sangan ternyata sangat baik dan memberikan arahan yang baik



 Suka

Tanggapan dari pemilik 15 menit lalu
Assalamu alaikum Wr. Wb
Yth Ms. Silfani

Terima kasih atas waktu yang telah anda luangkan untuk memberikan review tentang Pengadilan Agama Sijunjung.

Semoga anda selalu merasa aman & nyaman selama berada di Pengadilan Agama Sijunjung.

Salam Hormat

Urutkan menurut

Paling relevan Terbaru Tertinggi Terendah

 **Maizul Imran**
1 ulasan

 21 jam lalu **BARU**

Tanggapan dari pemilik 13 menit lalu
Assalamu alaikum Wr Wb.
Terima kasih Bapak Maizul Imran telah memberikan bintang 5 untuk Pengadilan Agama Sijunjung.
Semoga Anda nyaman dan berkenan dengan layanan kami.
Kami menantikan kesempatan untuk menyambut dan melayani anda kembali di masa mendatang.

Salam Hormat.

 **jupriadi Abu HZ**
Local Guide · 45 ulasan · 163 foto

 2 minggu lalu **BARU**

Pelayanan nya baik sekali dg Pak Yogi  

*Urusan Legalisir SK Penetapan Pernikahan Bos



 Suka

Tanggapan dari pemilik 3 menit lalu
Assalamu alaikum Wr. Wb.

Terima kasih Bapak Jupriadi Abu HZ atas bintang 5 dan review positif yang Anda berikan untuk Pengadilan Agama Sijunjung.

Semoga anda selalu merasa aman & nyaman selama berada di Pengadilan Agama Sijunjung.

Kami menantikan kesempatan untuk menyambut dan melayani anda kembali di masa mendatang.

Salam Hormat

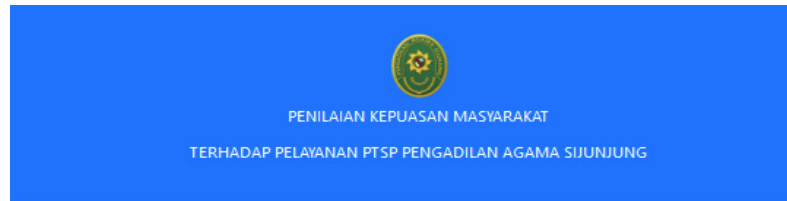
3. Pemberian kalung identitas pengunjung pada gerbang masuk oleh satpam



Briefing petugas ttg pelayanan pengunjung

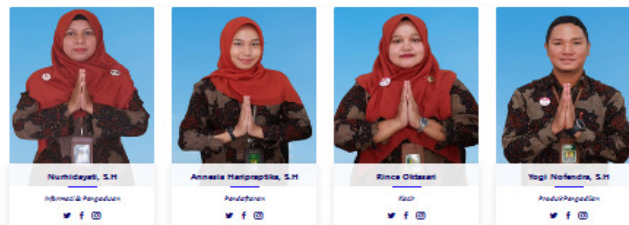


4. Pembuatan menu survey kepuasan layanan dengan objek petugas Posbakum pada aplikasi yang sudah ada



Selamat Siang !! Selamat Tengah !! 05-Oct-2022 | Pulut - 14:00 WIB
Perhatian!!! untuk memberikan penilaian yang jujur/tulus siapkan Rtn Foto yang akan di Nilai.

PETUGAS LAYANAN PTSP



PETUGAS POSBAKUM



5. Pembinaan terus menerus tentang kedisiplinan, kerapian dan kelengkapan seragam pegawai pada saat rapat dan apel senin pagi maupun briefing



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAWASBID

ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI
PERKARA

TRIWULAN III
TAHUN 2022

PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG



Pengadilan Agama Sijunjung
Jl. Prof.M.Yamin No. 65
Telp. 07542200565 Fax. 075420734
Sijunjung - Sumatera Barat 27511
e-mail : pa.sijunjung@pta-padang.go.id

**TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN III
ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PERKARA**

Bulan Juli s/d September 2022 pada Pengadilan Agama Sijunjung

A. Administrasi Persidangan

No	Bidang Pengawasan	Kondisi	Kriteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera/ Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/ Jurusita Pengganti	Berjalan sesuai dengan SCP, di SIPP dilaksanakan dengan tertib dinari pendaftaran itu juga dan oleh akun masing-masing sesuai dengan tupoksi;	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV dan SOP Pengadilan	Sudah berjalan dengan baik;	Telah tertib administrasi;	Terus diingatkan;	Telah berjalan sesuai SOP dan ketentuan

		Agama Sijunjung;					
2.	Penetapan Hari Sidang	PHS Berjalan sesuai dengan SOP dan dilaksanakan dalam hari yang sama dengan pendaftaran dan telah terbit dalam penggunaan aplikasi SIPP, akan tetapi ada beberapa berkas perkara pada persidangan Gugatan, PHS pada beberapa perkara e-court tercantum alamat tempat tinggal terjadi pengulangan alamat;	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR/RBg, RV PERMA 3/2018, PERMA 1/2019 dan SOP Pengadilan Agama Sijunjung;	Kesalahan input (input data ganda);	Ketika didokumen cetak, terjadi pengulangan alamat para pihak pada Penetapan hari sidang;	Memaksimalkan dan memperbaiki, Aplikasi ABT untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian BAS dan memberikan edukasi kepada petugas masing masing tupoksi tentang penggunaan aplikasi SIPP oleh Panitera; <i>Eviden, yang dijadikan sampel temuan di arsip perkara;</i> <i>Perkara 250/Pdt.G/2022/PA.SJJ</i> <i>Perkara 213/Pdt.G/2022/PA.SJJ</i> <i>Perkara 212/Pdt.G/2022/PA.SJJ</i>	Menjadi daftar inventaris masalah pada aplikasi e-court untuk diteruskan kepada tim development aplikasi e-court di Mahkamah Agung

3.	Relaas Panggilan Hari Sidang dan Pemberitahuan Putusan	Panggilan hari Sidang/relaas panggilan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan aturan hukum acara akan tetapi ada beberapa relaas harus lebih diperhatikan;	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV, SEMA 1/2017, PERMA 3/2018, PERMA 1/2019 dan SOP Pengadilan Agama Sijunjung;	Kurang sosialisasi;	Terjadi keterlambatan proses persidangan, dan harus melakukan perbaikan dokumen;	Panitera memberikan pembinaan terus menerus secara langsung, tentang prosedur perkara e-court/e-litigasi agar kedepannya lebih baik;	Telah ditindaklanjuti
		Relaas harus sampai pada Majelis Hakim sebelum sidang perkara dimulai, dan sudah patut sah dan resmi (misal relaas harus sudah ditandatangani oleh Petugas);				<i>Eviden, yang dijadikan sampel temuan di arsip perkara</i>	
						<i>272/Pdt.G/2022/PA.SJ (relaas belum ditandatangani oleh petugas) 213/Pdt.G/2022/PA.SJ (relaas tidak ada alamat email dan relaas T diberi nama relaas elektronik)</i>	
						<i>250/Pdt.G/2022/PA.SJ (relaas tidak ada alamat email dan relaas T diberi nama relaas elektronik)</i>	
		Relaas perkara e-court harusnya dicantumkan alamat email pada relaas elektronik				<i>213/Pdt.G/2022/PA.SJ (tidak ada alamat email dan relaas T diberi nama relaas elektronik)</i>	
		Pengugat/Pemohon;					

	Relaas panggilan Tergugat/Termohon pada perkara e-court tidak diberikan nama relaas elektronik kecuali telah didaftar sebagai perkara e-litigasi;						
4	Berita Acara Sidang	Sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi terhadap teknis penyusunan BAS dan penulisan BAS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku termasuk BAS perkara beracara dengan elektronik, namun ada beberapa catatan seperti alamat pada identitas para pihak pada BAS, terjadi kesalahan penulisan	Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV, PERMA 3/2018,	Terjadi kesalahan input pada data Aplikasi ABT SIPP;	Terjadi kesalahan pada dokumen, Berita acara sidang;	Memaksimalkan dan memperbaiki, Aplikasi ABT untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian BAS, selanjutnya perlu kehati-hatian semua petugas baik dari pendaftaran, sampai pada Majelis Hakim, Panitera Pengganti; <i>Eviden, yang dijadikan sampel temuan di arsip perkara;</i> <i>250/Pdt.G/2022/PA.SJJ</i> <i>213/Pdt.G/2022/PA.SJJ</i>	Menjadi daftar inventaris masalah pada aplikasi e-court untuk diteruskan kepada tim development aplikasi e-court di Mahkamah Agung

		(pengulangan pengetikan)	PERMA 1/2019, standar penulisan BAS dan SCP;				
5	Minutasi Perkara dan arsip	Sudah sesuai dengan SOP, dan di SIPP sudah berjalan 100% <i>one day minute</i> , yang perlu ditingkatkan adalah minutasi <i>real</i> , karena belum dapat melaksanakan sepenuhnya 100% <i>one day minute</i> , misal ada beberapa temuan sekitar 18 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap namun belum masuk pada ruang arsip perkara, dan 8 perkara yang belum	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV, PERMA 3/2018, PERMA 1/2019,	Terjadi penumpukan berkas perkara di lemari Panitera Hukum;	Akan terjadi penumpukan berkas sehingga kesan kurang rapi;	Mempercepat minutasi berkas perkara, dan pengarsipan berkas perkara non aktif, di kontrol oleh Panitera Eviden, yang dijadikan sampel temuan di arsip perkara 250/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit) 236/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit) 242/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit)	Telah diindaklanjuti

		PERMA 7/2015 dan SOP;				
		dijahit;				

B. Administrasi Perkara

No	Bidang Pengawasan	Kondisi	Kreteria	Sebab	Akibat	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Prosedur Penerimaan Perkara	- Telah sesuai dengan SOP, terhadap aplikasi gugatan mandiri sudah mulai dilaksanakan dan perlu lebih ditingkatkan lagi secara maksimal; - Memaksimalkan perkara e-litigasi, dengan mendaftarkan	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV, PERMA 3/2018, PERMA 1/2019, PERMA 7/2015, pengelolaan administrasi e-Register Perkaradan	Masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Sijunjung tidak semua mengerti dengan IT;	Gugatan mandiri, e-court dan e-litigasi tidak maksimal;	Pinak ketiga (Posbakum/Lembaga Bantuan Hukum) yang telah profesional dan telah bekerjasama dengan Pengadilan Agama Sijunjung, membantu masyarakat untuk pembuatan gugatan melalui aplikasi gugatan mandiri;	Tetap dipertahankan dan dikembangkan

	perkara Permohonan melalui aplikasi E-court dan memaksimalkan jumlah perkara e-court baik perkara Gugatan ataupun Permohonan;	e-Keuangan Perkara secara elektronik sesuai surat yang dikeluarkan Dirjen Badiag nomor 3396/DJA/OT.02.1/VI/2019;					
2	Buku Register	E-register perkara telah dilaksanakan dengan baik, namun banyak data yang tidak dapat di cover oleh aplikasi register terkadang berbeda dengan data yang sebenarnya, misal data mediasi, perkara E-court dan E-litigasi, data perkara yang memakai kuasa	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, HIR RBg, RV, PERMA 3/2018, PERMA 1/2019, PERMA 7/2015, pengelolaan administrasi	Akan terjadi ketidak sinkronan data laporan bulanan dengan data yang sebenarnya, tidak ada data perbandingan yang akurat untuk mempertanggung jawabkan isi	Maka kualitas laporan tidak Akuntabel, efektif dan efisien, karena akan ada perbaikan;	Panitera harus mengontrol dan mengevaluasi petugas yang bertanggung jawab dan membagi tanggungjawab kepada masing-masing yang ditunjuk;	Terhadap data yang belum terakomodir oleh sistem, ke depan akan dibuatkan register manualnya;

	hukum, pihak (perkara Cerai) yang memiliki pekerjaan PNS/ASN, data sisa anggaran sidang keliling, POSBAKUM, Prodeo, Sidang terpadu dan data yang lain seharusnya dibuat buku register manualnya, agar ada data dukung dari setiap laporan bulanan atau tahunan;	e-Register Perkaradan Perkaradan e-Keluangan Perkara secara elektronik sesuai surat yang dikeluarkan Dirjen Badiag nomor 3396/DJA/OT.02.1/I/2019;	laporan tersebut;			
3.	Laporan- Laporan Laporan bulan berjalan dan laporan bulan yang lalu sering tidak sinkron dan terhadap materi laporan tersebut	Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 50 Tahun	Tidak ada data register manual, untuk mencatat data yang tidak dapat di backup oleh	Laporan bulan berjalan dan laporan bulan yang lalu sering tidak sinkron dan terhadap materi laporan	Panitera harus mengontrol, mengevaluasi dan menunjuk petugas untuk mendokumentasi atau membuat laporan manual terhadap data tersebut;	Telah diindaklanjuti

juga sering terjadi ketidak sesuaian dengan data yang sebenarnya	2009	tentang	aplikasi SIIP untuk pembuatan laporan bulanan;	tersebut juga sering terjadi ketidak sesuaian dengan data yang sebenarnya;		
	Kekuasaan Kehakiman, HIR RBG, RV, PERMA 3/2018, PERMA 1/2019, PERMA 7/2015, pengelolaan administrasi e-Register Perkaradan e-Keuangan Perkara secara elektronik sesuai surat yang dikeluarkan Dirjen Badilag nomor 3396/DJA/OT.02.1/VI/2019, SOP;					

Sijunjung, 13 Oktober 2022:

Panitera


Erathoni Agung Saripraja, S.H.

EVIDEN TINDAK LANJUT

HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS TRIWULAN III

ADMINISTRASI PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PERKARA

TAHUN 2022

A. ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
Tindak Lanjut:
Telah berjalan sesuai dengan SOP, di SIPP dilaksanakan dengan tertib dihari pendaftaran itu juga dan oleh akun masing-masing sesuai dengan tupoksi;

2. Penetapan Hari Sidang

Kondisi:

PHS Berjalan sesuai dengan SOP dan dilaksanakan dalam hari yang sama dengan pendaftaran dan telah tertib dalam penggunaan aplikasi SIPP, akan tetapi ada beberapa berkas perkara pada persidangan Gugatan, PHS pada beberapa perkara e-court tercantum alamat tempat tinggal terjadi pengulangan alamat;

Tindak Lanjut:

Menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada aplikasi e-court untuk diteruskan kepada Tim Development aplikasi e-court di Mahkamah Agung.

3. Relas Panggilan Hari Sidang dan Pemberitahuan Putusan

Kondisi:

Panggilan hari Sidang/relas panggilan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP dan aturan hukum acara akan tetapi ada beberapa relas harus lebih diperhatikan;

- Relas harus sampai pada Majelis Hakim sebelum sidang perkara dimulai, dan sudah patut sah dan resmi (misal relas harus sudah ditandatangani oleh Petugas)
- Relas perkara e-court harusnya dicantumkan alamat email pada relas elektronik Pengugat/Pemohon
- relas panggilan Tergugat/Termohon pada perkara e-court tidak diberikan nama relas elektronik kecuali telah didaftar sebagai perkara e-litigasi;

Tindak Lanjut:

Telah ditindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan money kepaniteraan tentang prosedur perkara e-court/e-litigasi agar kedepannya lebih baik;



4. Berita Acara Sidang

Kondisi:

Sudah sesuai dengan SOP, akan tetapi terhadap teknis penyusunan BAS dan penulisan BAS telah dilaksanakan sesuai dengan aturan berlaku termasuk BAS perkara beracara dengan elektronik, namun ada beberapa catatan seperti alamat pada identitas para pihak pada BAS, terjadi kesalahan penulisan (pengulangan pengetikan)

Tindak Lanjut

Menjadi Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada aplikasi e-court untuk diteruskan kepada Tim Development aplikasi e-court di Mahkamah Agung.

5. Minutasi Perkara dan arsip

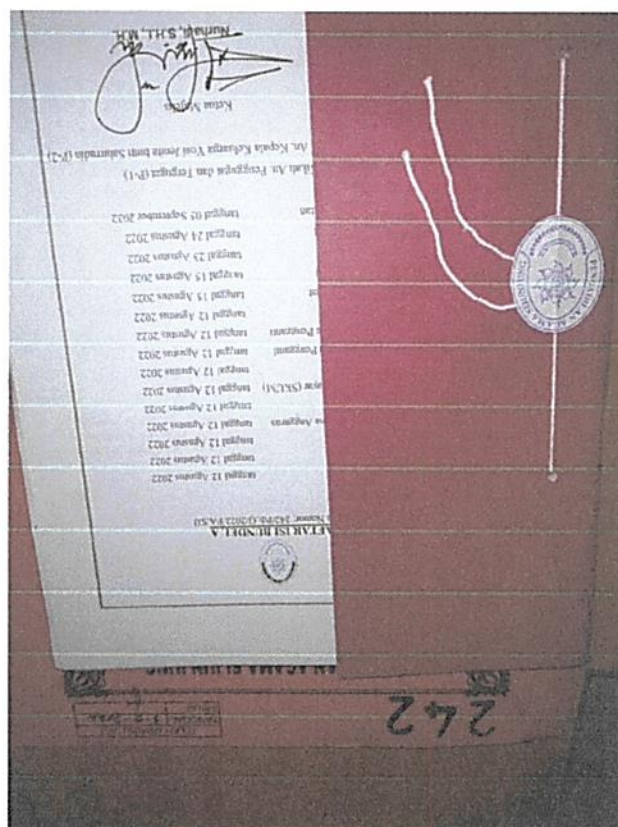
Kondisi:

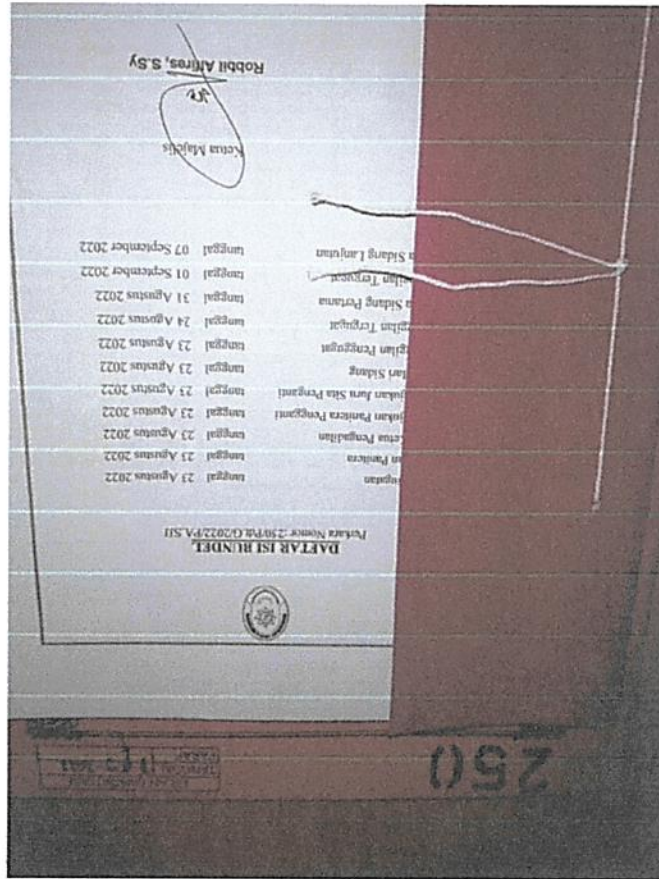
Sudah sesuai dengan SOP, dan di SIPP sudah berjalan 100% *one day minute*, yang perlu ditingkatkan adalah minutasasi *real*, karena belum dapat melaksanakan sepenuhnya 100% *one day minute*, misal ada beberapa temuan sekitar 18 perkara yang sudah berkekuatan Hukum tetap namun belum masuk pada ruang arsip perkara, dan 8 Perkara yang belum dijahit;

Tindak Lanjut:

Telah ditindaklanjuti

Eviden, yang dijadikan sampel temuan di arsip perkara
250/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit)
236/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit)
242/Pdt.G/2022/PA.SJJ (belum dijahit)





B. ADMINISTRASI PERKARA

1. Prosedur Penerimaan Perkara

Kondisi:

- Telah sesuai dengan SOP, terhadap aplikasi gugatan mandiri sudah mulai dilaksanakan dan perlu ditingkatkan lagi secara maksimal;
- Memaksimalkan perkara e-litigasi, dengan mendaftarkan perkara Permohonan melalui aplikasi E-court dan memaksimalkan jumlah perkara e-court baik perkara Gugatan ataupun Permohonan;

Tindak Lanjut:

• Telah sesuai dengan SOP dan ketentuan;

2. Buku Register

Kondisi:

E-register perkara telah dilaksanakan dengan baik, namun banyak data yang tidak dapat di cover oleh aplikasi register terkadang berbeda dengan data yang sebenarnya, misal data mediasi, perkara Ecourt dan E-litigasi, data perkara yang memakai kuasa hukum, pihak (perkara Cera) yang memiliki pekerjaan PNS/ASN, data sisa anggaran sidang keiling, POSBAKUM, Prodeo, Sidang terpadu dan data yang lain seharusnya dibuat buku register manualnya, agar ada data dukung dari setiap laporan bulanan atau tahunan;

Tindak Lanjut:

Telah ditindaklanjuti, ke depan terhadap data keperkaraan yang belum terakomodir oleh sistem akan dibuatkan register manualnya;

3. Laporan-Laporan

Kondisi:

Laporan bulan berjalan dan laporan bulan lalu sering tidak sinkron dan terhadap materi laporan tersebut juga sering terjadi ketidak sesuaian dengan data yang sebenarnya;

Rekomendasi:

Telah ditindaklanjuti dengan mengadakan kegiatan money kepantiteraan tentang laporan perkara agar ke depannya lebih baik;

Sijunjung, 13 Oktober 2022

Panitera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. A. Saripraja'.

Erathoni Agung Saripraja, S.H.